

Surat Menuntut Kebebasan Akademis dalam Upaya Mendukung Forum Rakyat Air Dunia di Bali pada Mei 2024

Letter for Academic Freedom in Support of the People's Water Forum in Bali May 2024

(español mas abajo)

Kami yang bertandatangan di bawah ini mengecam upaya yang baru-baru ini terjadi untuk menghalangi pelaksanaan *the People's Water Forum* (PWF) atau Forum Air milik Rakyat Sedunia di Bali, Indonesia, melalui pembatalan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut di Institut Seni Indonesia (ISI) yang disertai interogasi/intimidasi terhadap panitia lokal oleh aparat intel setempat.

Pembatalan acara yang diselenggarakan bersama institusi akademis melalui koersi dan pelarangan oleh penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap Prinsip PBB untuk Penerapan Hak Kebebasan Akademik. Secara khusus, untuk menghormati otonomi lembaga pendidikan dan penelitian untuk beroperasi tanpa pengawasan atau intervensi militer, tanpa ketakutan akan sanksi atau ancaman terhadap keamanan dan integritas pimpinan lembaga (Prinsip 3). Hak atas Kebebasan Akademik juga mencakup kebebasan berserikat (prinsip 6), yang mengharuskan negara "menghormati, mendorong dan mengembangkan hubungan dan kerja sama internasional antara staf akademik, peneliti dan pengajar serta mahasiswa, termasuk

We, the undersigned, are writing to denounce recent efforts to suppress the People's Water Forum (PWF) in Bali, Indonesia, through the cancellation of event venues at the Indonesian Arts Institute and the interrogation/intimidation of local organizers by intelligence officers.

The cancellation of our events at an academic institution through coercion and restriction by law enforcement constitutes a violation of the UN Principles for Implementing the Right to Academic Freedom. Specifically, disrespecting the autonomy of academic institutions to operate without surveillance or military intervention, fear of sanction or threats to the security and integrity of institutional leaders (Principle 3). The Right to Academic Freedom also includes the freedom of association (Principle 6), which requires states "respect, encourage and develop international contacts and cooperation among academic, research and teaching staff and students, including through international gatherings and collaborative projects."

melalui pertemuan internasional dan proyek kolaboratif.”

The People’s Water Forum adalah wadah bagi gerakan keadilan air di seluruh dunia. Secara kolektif wadah ini memungkinkan pemikiran kritis atas Forum Air Dunia atau the World Water Forum (WWF) yang mempromosikan agenda pembangunan yang disetir kepentingan pemodal. PWF berbasis pada pengalaman dan aspirasi jaringan gerakan sosial, organisasi akar rumput, kelompok lingkungan, dan serikat pekerja serta akademisi, dan mewakili mereka yang kehidupannya dirugikan oleh proses privatisasi dan komersialisasi air.

Jaringan yang tergabung dalam PWF (yang sebelumnya dikenal sebagai Alternative World Water Forum), telah selama 20 tahun menawarkan forum terbuka yang dapat dijangkau secara inklusif baik oleh warga, komunitas, serikat, dan aktivis lingkungan. Forum ini menjadi tempat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, dengan tujuan mencari solusi baru bagi masa depan pembangunan terkait air yang adil, setara dan berkelanjutan. Sejak 2003, wadah ini telah menggalang solidaritas dan meningkatkan kapasitas jaringan regional dan global melalui pertemuan-pertemuan berikut: di Kyoto pada 2003, Meksiko 2006, Istanbul 2009, Marseille 2012, Daegu 2015, Brasilia 2018 and Dakar 2022.

The People’s Water Forum is a coordinating platform for water justice movements around the world. Our collective criticism of the World Water Forum (WWF) and its corporate-driven agenda is informed by our experiences as social movement networks, grassroots organizers, environmental groups, labour organizations and academics representing and serving those most impacted by privatization, commodification and poisoning of our water supplies.

Networks affiliated with the People’s Water Forum (previously known as the Alternative World Water Forum) have organized for nearly 20 years to offer an open, accessible space for frontline communities, workers and water defenders to share knowledge and build solutions towards a just, equitable and sustainable water future. Since 2003, we have consolidated our efforts to build solidarity and capacity through regional and global networks through the following key gatherings: in Kyoto 2003, Mexico 2006, Istanbul 2009, Marseille 2012, Daegu 2015, Brasilia 2018 and Dakar 2022.

Komunitas dalam jaringan PWF sadar bahwa aktor-aktor dalam WWF telah sebelumnya melakukan upaya untuk memengaruhi organisasi setempat untuk membatalkan penyelenggaraan PWF, tetapi tidak pernah berhasil.

The networked communities within PWF is aware that the actors of WWF have made previous attempts to influence local institutions to cancel our events, they have never succeeded.

Sangat disayangkan bahwa niat baik dan tradisi kritis yang telah dibangun dan dirawat dalam PWF dibungkam oleh aparat negara Republik Indonesia; Forum PWF yang direncanakan untuk diselenggarakan di Institut Seni Indonesia (ISI), Denpasar, Bali pada tanggal 20 sampai 23 Mei 2024, telah dibatalkan dengan paksa. Ini akan menjadi peristiwa pertama pembatalan PWF secara autoritarian oleh negara atas tekanan WWF.

It is very unfortunate that the good intentions and critical traditions within the PWF were silenced by the state apparatus of the Republic of Indonesia; the Forum planned on 20th -23rd May 2024 at the Indonesian Arts Institute in Denpasar Bali has been forcibly cancelled. This will be in history as the first cancelled PWF in an authoritarian manner by the State as a result of the influence of the WWF.

Berikut adalah kronologi peristiwa-peristiwa yang berakhir pada pembatalan acara PWF dan penarikan diri ISI sebagai Lembaga akademik yang mendukung forum:

- Tanggal 2 April 2024, Pengurus Yayasan Bintang Gana, yang merupakan organisasi setempat, mewakili panitia nasional PWF menghubungi Rektor ISI menjajaki kerjasama acara Musyawarah Budaya Air Warga. Rektor ISI memberikan sinyal positif sehingga Yayasan mengirimkan surat permohonan kerjasama secara resmi.
- Tanggal 18 April 2024 dilakukan pertemuan teknis antara Yayasan dan Universitas, termasuk menindaklanjuti

The following is a chronology of events leading to the cancellation of PWF events and withdrawal of support from the Indonesian Institute of Arts:

- On April 2 2024, the management of the Bintang Gana Foundation, a local organization representing the PWF national committee, contacted the Chancellor of the Indonesian Institute of Arts to discuss their collaboration in the Community Water Cultural Conference event. Based on the Chancellor's positive response, the Foundation sent an official letter requesting cooperation.
- On April 18 2024 a technical meeting was held between the Foundation and the University, during which the Chancellor

permintaan Rektor agar logo ISI dicantumkan dalam acara, dan menyertakan beberapa staf ISI dalam kepanitiaan.

- Tanggal 4 Mei 2024 enam orang intel Polresta Denpasar mendatangi rumah direktur Yayasan Bintang Gana; mereka menanyakan perihal agenda menjelang WWF, dan bertanya apakah akan ada agenda tandingan atau aksi.
- Tanggal 5 Mei 2024 empat intel Polresta kembali mendatangi rumah direktur Yayasan Bintang Gana dengan alasan untuk berkoordinasi menjelang WWF, namun sudah mengarahkan pertanyaan secara spesifik pada PWF dengan alasan mengetahuinya dari media sosial. Ketika kembali ditanya mengenai aksi tandingan, direktur menjawab bahwa tidak ada rencana aksi karena cukup repot dan akan dibubarkan seperti dalam konteks G20 Bali Summit 2022.
- Tanggal 7 Mei 2024, kediaman direktur kembali didatangi. Kali ini oleh intel kodam; isteri direktur juga diinterogasi. Pada hari yang sama Kubu Kopi (tempat para aktivis dan wartawan terbiasa berkumpul) pun didatangi intel, staf kafe juga diinterogasi.
- Tanggal 13 Mei 2024, rektor ISI menelepon direktur Yayasan memberi tahu bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menelepon dan memintanya untuk membatalkan acara, atau memundurkan acara tersebut sampai kegiatan WWF telah selesai. Pengurus Yayasan Bintang Gana meminta surat pembatalan dari

requested that the ISI logo be included in the event and authorized the participation of several ISI staff in the organizing committee.

- On May 4 2024, six police intelligence officers came to the house of the director of the Bintang Gana Foundation; they asked about the agenda ahead of WWF and whether there would be a counter agenda or action.
- On May 5 2024, four police intelligence officers returned to the house of the director of the Bintang Gana Foundation for the reason of coordinating ahead of the WWF, but the officers were in fact specifically targeting issues related to PWF, as they said that they were informed through social media. When being asked again about counter action, the director answered that there was no demonstration planned because it would be quite troublesome and more likely it would be disbanded as in the context of the 2022 G20 Bali Summit.
- On May 7 2024, the director's residence was visited again, this time by military intelligence officers; the director's wife was questioned. On the same day, Kubu Kopi (where activists and journalists usually gather) was visited by intelligence, and the cafe staff were also questioned.
- On May 13, 2024, the ISI chancellor called the Foundation director to inform him that the Ministry of Education, Culture, Research and Technology had called and asked him to cancel the event or postpone the event until WWF had

rektor namun tidak disanggupi. Surat pembatalan kemudian telah diterbitkan, namun tanpa alasan.

- Tanggal 14 Mei 2024, wisma yang telah bersedia menjadi tempat menginap para peserta PWF, membatalkan pemesanan tempat yang telah dilakukan panitia.
- Sejak 15 Mei 2024, mulai banyak gangguan: WA aktivis diretas, tautan registrasi dan situs PWF di *trolling*. Setelah dicek, IP address pelaku *trolling* terlacak berasal dari Bali.
- Panitia mulai mencari pilihan sejumlah tempat alternatif untuk penyelenggaraan PWF, namun beberapa tempat yang dianggap potensial kemungkinan juga telah didatangi dan diintimidasi oleh intel.
- Sekitar tengah malam pada tanggal 18 Mei 2024, akomodasi aktivis Solidaritas Perempuan, salah satu organisasi dalam jaringan PWF di Indonesia, didatangi intel, yang menyebabkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan waktu beristirahat mereka.

Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA) sebagai koordinator jaringan PWF di Indonesia, menilai bahwa dalam sepuluh tahun terakhir terdapat pola intimidasi terhadap berbagai acara kritis masyarakat sipil, dengan cara menekan pihak penyedia tempat penyelenggaraan acara. Sejak 2013 tidak ada lagi aksi tandingan yang diperbolehkan untuk bersikap kritis terhadap negara. Pada 2018, di acara tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter

finished. The management of the Bintang Gana Foundation requested a letter of cancellation from the chancellor but this was not granted. A cancellation letter was then issued, but without reason.

- On May 14 2024, the guest house which was willing to provide accommodation for the PWF participants canceled the reservation made by the committee.
- Since May 15 2024, there have been many disturbances: social media accounts of PWF organizers have been hacked, the registration link and PWF website were trolled by individuals whose IP addresses were from Bali.
- The committee began looking for new locations to hold the PWF, but several locations that were considered possible had also been terrorised and intimidated by intelligence.
- Around midnight on 18th May 2024, the accommodation of activists of Solidaritas Perempuan (Women in Solidarity), one of the PWF network members, was observed by intelligence officers, causing worries and disturbances to their resting time.

The Indonesian Coalition for the Right to Water (KRUHA), as the coordinator of PWF network in Indonesia, assesses that in the last ten years there has been a pattern of intimidation of critical events towards civil society, by putting pressure on the providers of the event venues. Since 2013 protests against the state have been restricted. In 2018 at the annual World Bank and

Internasional (WB-IMF) di Bali, aksi doa bersama secara massal di Renon, dibubarkan aparat kepolisian. Hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan gerakan anti-demokratis negara Indonesia.

International Monetary Fund (WB-IMF) event in Bali, a mass prayer action against the meeting in Renon was dispersed by the police. All of these together is one form and manifestation of anti-democratic intention of the Indonesian state.

Bali sebagai industri turisme, yang sejatinya adalah industri yang haus air, belakangan ini telah juga mengalami krisis air bersih. Akibatnya keberlanjutan daya dukung air dan lingkungan bagi aktivitas vital petani dan rumah tangga telah dikorbankan atas nama akumulasi kapital dan dampak buruknya. Masyarakat Bali berkepentingan dengan agenda keberlanjutan lingkungan termasuk sumber daya air demi industri pariwisata yang berkeadilan secara sosial dan lingkungan.

Bali is dominated by a tourism industry, an inherently water-hungry industry which brings Bali to experience a water crisis of its own. Consequently, the livelihoods of farmers and local communities are undermined for the sake of capital accumulation and its negative externalities. Thus, communities in Bali have stakes in the environmental sustainability agenda, including water sources, for a more socially and environmentally just tourism industry.

Dalam *roadmap* menuju PWF 2024 telah diselenggarakan beberapa diskusi semisal dalam rangka perayaan Hari Air Dunia 22 Mei 2024 melalui seminar dan diskusi terfokus, baik secara daring maupun luring seperti di Yogyakarta dan Semarang. Acara pendahuluan ini telah mengidentifikasi dan mengumpulkan persoalan-persoalan akses air bersih, dan pengelolaan air dan lingkungan yang selama ini tidak menjadi perhatian pemerintah. Lebih jauh, pemerintah dan korporasi justru berada dibalik perluasan perusakan sumber-sumber dan tubuh air. Kami menilai bahwa meneruskan suara rakyat ini di PWF 2024 di

The PWF in Indonesia has been collaborating with allies around the world over the past year in the lead-up to this event. The “Roadmap towards PWF 2024”, included several hybrid events, such as a celebration of World Water Day 22 May 2024 connecting virtual seminars with face-to-face meetings in Yogyakarta and Semarang. This preliminary event helped us to identify key issues relating to clean water access and sustainable water governance that have so far not received the government's attention. Furthermore, it is the state institutions and corporates that widen the destructive processes of water

Denpasar adalah sangat mendesak, dalam rangka mencari solusi dan memberikan arahan kritis perubahan kebijakan.

resources and water bodies. It is vital that we be allowed to continue unimpeded in our efforts to build solutions and provide critical direction for policy change at the 2024 PWF in Denpasar.

Sebagai akademisi dan pekerja kemanusiaan yang mendukung PWF, kami meminta otoritas publik dan Institut Seni Indonesia untuk mempertahankan kebebasan akademis melalui sejumlah tindakan konkrit sebagai berikut:

1. Mengecam segala bentuk ancaman, intimidasi dan pelarangan yang dilakukan baik oleh otoritas kampus, apalagi oleh aparat keamanan dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh insan akademik, organisasi masyarakat sipil, termasuk para aktivis hak asasi manusia.
2. Menuntut negara (c.q. pemerintah) agar menghormati hak dan kebebasan akademik, kebebasan berpendapat dan berkumpul warga negara termasuk kebebasan memberikan saran, masukan, kritik, dan aksi protes terhadap arah pembangunan secara umum, dan secara khusus pada isu perwujudan hak atas air yang telah dijamin oleh konstitusi;
3. Menuntut agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memproses pelanggaran atas kebebasan akademik, berpendapat dan berkumpul, baik yang dilakukan oleh aparat keamanan (human rights violation) maupun

As academics and human right defenders supporting the PWF, we call on public authorities and the Indonesian Arts Institute to uphold academic freedom through the following steps:

1. Condemning all forms of threat, intimidation and prohibition that are carried by academic institutions, especially by security officers in the events organised by academicians, civil societies, including human right activists.
2. Demanding the State (re: Government of Indonesia) to respect academic freedom, the freedom of speech and assembly for citizens, to give opinion, critiques and practice protesting acts towards development agenda. Specifically, on the issue of human right to water that is guaranteed by Indonesia's Constitution;
3. Demanding Indonesia's National Commission on Human Right to process the violation of academic freedom, freedom of speech and freedom of assembly by the security officers as well as academic institutions in all its forms.

pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas kampus dalam segala bentuknya.

4. Meminta lembaga dan institusi berikut untuk ikut memantau dan menindaklanjuti kasus ini:

- a. Atnike Nova Sigi, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- b. Farida Shaheed, UN Special Rapporteur on the right to education
- c. Pedro Arrojo, UN Special Rapporteur on the rights to safe drinking water and sanitation
- d. Mary Lawlor, UN Special Rapporteur on human rights defenders

4. Requesting the following organizations and institutions to watch and follow up this case:

- a. Atnike Nova Sigi, National Commission on Human Rights, Republic of Indonesia
- b. Farida Shaheed, UN Special Rapporteur on the right to education
- c. Pedro Arrojo, UN Special Rapporteur on the rights to safe drinking water and sanitation
- d. Mary Lawlor, UN Special Rapporteur on human rights defenders

Por la Libertad Académica y en Apoyo al Foro de los Pueblos por el Agua en Bali, Indonesia, mayo de 2024

Nosotras y nosotros, los abajo firmantes, nos manifestamos para denunciar los recientes esfuerzos por silenciar el Foro de los Pueblos por el Agua (PWF) en Bali, Indonesia, a través de la cancelación de los espacios de los eventos en el Instituto Indonesio de las Artes y el interrogatorio/intimidación hacia los organizadores locales por parte de agentes de inteligencia.

La disrupción de nuestros eventos en una institución académica a través de la coacción y restricción por parte de las fuerzas del orden constituye una violación de los Principios de las Naciones Unidas para la aplicación del derecho a la libertad académica. En concreto, supone una falta de respeto a la autonomía de las instituciones académicas para funcionar sin la vigilancia ni la intervención militar, miedo a sanciones o amenazas a la seguridad e integridad de las y los que están al frente de estas organizaciones (Principio 3). El Derecho a la Libertad Académica también incluye la libertad de asociación (Principio 6), que exige a los Estados "respetar, fomentar y desarrollar los contactos internacionales y la cooperación entre el personal académico, investigador y docente y los estudiantes, incluso mediante reuniones internacionales y proyectos de colaboración."

El Foro de los Pueblos por el Agua es una plataforma de coordinación de los movimientos por la justicia hídrica en todo el mundo. Nuestra crítica colectiva al Foro Mundial del Agua (WWF) y a su agenda impulsada por las corporaciones, se fundamenta en nuestras experiencias como parte de redes de movimientos sociales, organizaciones de base, grupos ecologistas, organizaciones sindicales y académicas que representan y sirven a las y los más afectados por la privatización, la mercantilización y el envenenamiento de nuestras fuentes de agua.

Las redes afiliadas al Foro de los Pueblos del Agua, PWF (anteriormente conocido como Foro Alternativo Mundial del Agua) se han organizado durante casi 20 años para ofrecer un espacio abierto y accesible a las comunidades de primera línea, las y los trabajadores y las y los defensores del agua para compartir conocimientos y construir soluciones hacia un futuro del agua equitativo, sostenible y con justicia. Desde 2003, hemos consolidado nuestros esfuerzos para construir solidaridad y capacidad a través de redes regionales y globales en los siguientes encuentros: Kyoto 2003, México 2006, Estambul 2009, Marsella 2012, Daegu 2015, Brasilia 2018 y Dakar 2022.

Las redes de comunidades al interior del PWF son conscientes de que los actores del WWF han intentado influir en las instituciones locales para cancelar nuestros eventos, sin éxito, hasta el momento.

Es lamentable que las buenas intenciones y las tradiciones críticas dentro del PWF quieran ser silenciadas por el aparato estatal de la República de Indonesia; el Foro previsto del 20 al 23 de mayo de 2024 en el Instituto Indonesio de las Artes en Denpasar Bali ha sido cancelado por la fuerza. Este hecho pasará a la historia como el primer FMP acallado de manera autoritaria por el Estado como consecuencia del poder del WWF.

A continuación presentamos una cronología de los acontecimientos que condujeron a la cancelación de los eventos del PWF y al retiro del apoyo del Instituto Indonesio de las Artes:

- El 2 de abril de 2024, la dirección de la Fundación Bintang Gana, una organización local que representa al comité local del PWF, se puso en contacto con el Rector del Instituto Indonesio de las Artes para hablar de su colaboración en la Conferencia de la Comunidad Cultural del Agua. Ante la respuesta positiva de la autoridad, la Fundación envió una carta oficial solicitando su cooperación.
- El 18 de abril de 2024 se celebró una reunión técnica entre la Fundación y la Universidad, durante la cual el Rector solicitó que se incluyera el logotipo del ISI en el evento y autorizó la participación de varios miembros del personal del ISI en el comité organizador.

- El 4 de mayo de 2024, seis agentes de los servicios de inteligencia de la policía se presentaron en casa del director de la Fundación Bintang Gana; preguntaron por la agenda que tenía por delante en relación al WWF y si se estaría planificando alguna acción contraria.

- El 5 de mayo de 2024, cuatro agentes de los servicios de inteligencia de la policía retornaron a la casa del director de la Fundación Bintang Gana con la excusa de coordinar de cara al WWF, pero en realidad los agentes trataron cuestiones específicamente relacionadas con el PWF; dijeron que se les había informado a través de las redes sociales. Cuando se le preguntó una vez más sobre acciones en respuesta al foro oficial, el director respondió que no se había previsto ninguna manifestación porque sería bastante problemática y lo más probable es que se disolviera como en el contexto de la Cumbre del G20 de Bali en 2022.

- El 7 de mayo de 2024, la residencia del director fue visitada una vez más, esta vez por agentes de los servicios de inteligencia militar; la esposa del director fue interrogada. Ese mismo día, Kubu Kopi (donde suelen reunirse activistas y periodistas) recibió la visita de los servicios de inteligencia, y también se interrogó al personal de la cafetería.

- El 13 de mayo de 2024, el canciller del ISI llamó al director de la Fundación para informarle de que el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología había llamado y le había pedido que cancelara el acto o lo pospusiera hasta que el FMA hubiera terminado. La dirección de la Fundación Bintang Gana solicitó una carta de cancelación al canciller, pero no fue concedida. Entonces se emitió una carta de cancelación, pero sin presentar alguna causa en concreto.

- El 14 de mayo de 2024, los administradores de la casa de huéspedes que se tenía a disposición para proporcionar alojamiento a los participantes del PWF cancelaron la reserva realizada por el comité.

- Desde el 15 de mayo de 2024, han ocurrido muchos altercados: las cuentas de las redes sociales de los organizadores del PWF han sido hackeadas, el enlace de inscripción y el sitio web del PWF fueron objeto de *trolling* por parte de individuos cuyas direcciones de IP procedían de Bali.

- El comité comenzó a buscar nuevas ubicaciones para celebrar el PWF, pero muchos de los potenciales lugares fueron también objeto de intimidación por los servicios de inteligencia.

- Hacia la medianoche del 18 de mayo de 2024, el alojamiento de las activistas de Solidaritas Perempuan (Mujeres Solidarias) fue vigilado por agentes de inteligencia, lo que causó inquietud y perturbó su tiempo de descanso.

La Coalición Indonesia por el Derecho al Agua (KRUHA), como coordinadora de la red PWF en Indonesia, evalúa que en los últimos diez años ha habido un patrón de intimidación de eventos críticos organizados por la sociedad civil, presionando a los administradores de las sedes de los eventos. Desde 2013 se han restringido las protestas contra el Estado. En 2018, en el evento anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (BM-FMI) en Bali, una acción de oración masiva en Renon fue dispersada por la policía. Estas acciones son una manifestación de las acciones antidemocrática del Estado indonesio.

Bali está dominada por la industria del turismo, una industria inherentemente sedienta de agua que ha llevado a Bali a experimentar su propia crisis hídrica. En consecuencia, los medios de subsistencia de los agricultores y las comunidades locales se ven socavados en aras de la acumulación de capital y sus impactos negativos. Así pues, las comunidades de Bali tienen intereses en juego en la agenda de sostenibilidad medioambiental, incluidas las fuentes de agua, para una industria turística más justa desde el punto de vista social y medioambiental.

El PWF de Indonesia ha estado colaborando con aliados de todo el mundo durante el último año para preparar este acontecimiento. El "camino hacia el PWF 2024", incluyó varios eventos híbridos, como la celebración del Día Mundial del Agua, el 22 de mayo de 2024, conectando seminarios virtuales con reuniones presenciales en Jogjakarta y Semarang. Este evento preliminar nos ayudó a identificar cuestiones clave relacionadas con el acceso al agua potable y la gobernanza sostenible del agua que hasta ahora no han recibido la atención del gobierno. Además, son las instituciones estatales y las empresas las que amplían los procesos destructivos de los recursos hídricos y las fuentes de agua. Es vital que se nos permita continuar sin obstáculos en nuestros esfuerzos por construir soluciones y proporcionar una dirección crítica para el cambio de políticas en el PWF 2024 en Denpasar.

Como académicos y defensores de los derechos humanos que apoyan el PWF, hacemos un llamamiento a las autoridades públicas y al Instituto Indonesio de las Artes para que defiendan la libertad académica a través de los siguientes pasos:

1. Condenar todas las amenazas, intimidación y prohibiciones llevadas a cabo por las instituciones académicas, especialmente por los agentes de seguridad en los actos organizados por académicos, sociedades civiles y activistas de derechos humanos.
2. Exigir al Estado (es decir, al Gobierno de Indonesia) que respete la libertad académica, la libertad de expresión y de reunión de los ciudadanos, para dar su opinión, criticar y realizar actos de protesta en favor de la agenda de desarrollo. En concreto, sobre la cuestión del derecho humano al agua que garantiza la Constitución de Indonesia;

3. Exigir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia que procese la violación de la libertad académica, la libertad de expresión y la libertad de reunión por parte de los agentes de seguridad, así como de la institución académica en todas sus formas.

4. Pedir a las siguientes organizaciones e instituciones que vigilen y hagan un seguimiento de este caso:

- Atnike Nova Sigiro, Comisión Nacional de Derechos Humanos, República de Indonesia
- Farida Shaheed, Relatora Especial de la ONU sobre derecho a la educación
- Pedro Arrojo, Relator Especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento
- Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre defensores de los derechos humanos

Kami yang bertandatangan/ Signatories/ Firmantes:

1. Suraya Afiff, Universitas Indonesia
2. Prathiwi Putri, Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellow, Universität Kassel, Germany
3. Iqra Anugrah, Leiden University, Belanda
4. Siti Maimunah, Sajogyo Institute, Bogor
5. Meera Karunanathan, Carleton University, Canada
6. Wijanto Hadipuro, peneliti independen, Semarang
7. Amalinda Savirani, Universitas Gadjah Mada
8. Bosman Batubara, Utrecht University, Belanda
9. Irwansyah, Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia
10. I. Sandyawan Soemardi, pekerja kemanusiaan, Leiden, Belanda
11. Harry Wibowo, Jurnal Prisma
12. Henry Thomas Simarmata, Associated Program for International Law, Yogyakarta
13. Ar. John Muhammad, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Jakarta
14. Dewa Ayu Putu Eva Wishanti, University of Leeds
15. Dianto Bachriadi, Agrarian Resource Center
16. Frans Ari Prasetyo, peneliti independen, Bandung
17. Vandy Yoga Swara, Utrecht University, Belanda
18. Agung Wardana, Humboldt Fellow, Max Planck Institute for Public Law, Germany
19. Usman Hamid, Amnesty International Indonesia
20. Herlily, Universitas Indonesia
21. Wigke Capri, Leiden University and KITLV, Belanda
22. John Petrus Talan, IRGSC Kupang dan Universty College London
23. Dhia Al Uyun, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
24. Professor David McDonald, Queen's University, Canada

25. Farabi Fakhri, Universitas Gadjah Mada
26. Herlambang P. Wiratraman, Universitas Gadjah Mada
27. Inaya Rakhmani, Universitas Indonesia
28. Profesor Hariadi Kartodihardjo, Institut Pertanian Bogor
29. Dolorosa Sinaga, pematung internasional, Jakarta
30. Abdil Mughis Mudhoffir, University of Melbourne, Australia
31. Satria Unggul W, Universitas Muhammadiyah Surabaya
32. Herlambang P Wiratraman, Universitas Gadjah Mada
33. Riwanto Tirtosudarmo, peneliti, Jakarta
34. Syukron Salam, UNES Semarang
35. Achmad , UNS Surakarta
36. Robertus Robert, Universitas Negeri Jakarta
37. Prof. Mayling Oey, Guru Besar Emeritus, Universitas Indonesia
38. Prof. Arif Anshori Yusuf, Universitas Padjajaran
39. Idhamsyah Eka, Univ Persada Indonesia Jakarta
40. Herdiansyah Hamzah, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
41. Tsamarotul M, Penulis
42. Prof. Susi Dwi, Universitas Padjajaran
43. Prof. Sigit Riyanto, Universitas Gadjah Mada
44. Bivitri Susanti, STHI Jentera
45. M.Isnur, STHI Jentera
46. Saiful Mahdi, Unsyiah Aceh
47. Haris Azhar, STHI Jentera
48. Rina Mardiana, IPB University, Bogor
49. Asfinawati, STHI Jentera
50. Donny Danardono, Unika Soegijapranata
51. Sri Palupi, the Institute for Ecosoc Rights
52. Riska Darmawanti, peneliti independen
53. Hotmauli Sidabalok, PMLP Unika Soegijapranata
54. Treviliana Eka Putri, University of Groningen, Belanda
55. Randy W. Nandyatama, Universitas Gadjah Mada
56. Muhammad Rum, Universitas Gadjah Mada
57. Suci Lestari Yuana, Universitas Gadjah Mada
58. Diah Kusumaningrum, Universitas Gadjah Mada
59. Arindha Nityasari, Universitas Gadjah Mada
60. Preeta Dhar, SOAS University of London, United Kingdom
61. Adrian Murray, University of Johannesburg, South Africa
62. Richa Nagar, University of Minnesota
63. Koni Benson, University of the Western Cape, South Africa
64. Vera W. Setijawati Soemarwi, Leiden Law School
65. Riska Damayanti, Litoral

66. Barbara Van Dyck, Université Libre de Bruxelles
67. Rehad Desai, University of Johannesburg, South Africa
68. Susan Spronk, University of Ottawa, Canada
69. Marina Sitrin, Binghamton University, USA
70. Carlos Santos, Universidad de la República, Uruguay
71. Javier Taks, Universidad de la República, Uruguay
72. Elías Wolf, Universidade Católica do Paraná, PUCPR, Brazil
73. Tania Ricaldi, Universidad Mayor de San Simón, Bolivia
74. João Ferreira Santiago, Universidade Católica do Paraná, PUCPR, Brasil
75. Ricardo Moretti, Universidade de Brasília, Brasil
76. Peter Mollinga, Senior Fellow, ZEF, Bonn, Germany
77. Linda Sudiono, Universität Münster, Germany
78. Rika Febriyani, Humboldt Universität zu Berlin, Germany
79. Ahmad Safrudin - Masyarakat Peduli Air
80. Amelia S Bendang - Youth Marine Science Club
81. Alfe Sitorus - Jejak Sampah
82. Miya Irawati, Herb Feith Indonesia Engagement Centre, Monash University, Australia
83. Diatyka Widya Permata Yasih, Universitas Indonesia
84. Nursyahbani, Asosiasi LBH APIK Indonesia
85. Mary Galvin, University of Johannesburg, South Africa
86. Al-hassan Adam, PSIRU-University of Greenwich, UK
87. Georgina Vidriales Chan SENDAS AC // Redes del Agua México
88. Massimiliano Tomba, University of California, Santa Cruz, United States
89. Marcial Maçaneiro, Universidade Católica do Paraná, PUCPR, Brasil
90. Mary Rute Sperandio, Universidade Católica do Paraná, PUCPR, Brasil
91. Clóvis Torquato Junior, Universidade Católica do Paraná, PUCPR, Brasil
92. Dirce Gomes da Silva, Universidade Católica do Paraná, PUCPR, Brasil
93. Cynthia Susilo, peneliti independen, Indonesia
94. Monica Tanuhandaru, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari
95. Andrea Fitrianto, arsitek, Architecture Sans Frontières Indonesia
96. Prita Aniasti, pemerhati lingkungan, Malang
97. Prof. Mark Zeitoun, Director General, Geneva Water Hub
98. Gemma Gasseau, Scuola Normale Superiore, Italy
99. Prof. Mariana Achugar, Universidad de la República, Uruguay
100. Prof. Pedro Roberto Jacobi, University of São Paulo, Brazil
101. Donna Geagea, Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands
102. Hannah Porada, University of Amsterdam, the Netherlands
103. Marie Belland, University of Amsterdam, the Netherlands
104. Gabriel Silvestre, senior lecturer in urban planning, Newcastle University
105. Cat Button, Newcastle University, UK
106. Nancy Price, Alliance for Democracy, US. Water for People and the Planet Campaign

107. Francisco Rodríguez, Taula de l'aigua de Terrassa, Spain
108. Paulina Espinosa, Universidad Austral de Chile
109. Rocío Valdeavellano, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático MOCICC, Peru
110. Michel Azcueta Gorostiza, Villa El Salvador Mensajera de la Paz. Lima
111. Lupo Canterac Troya, Red Agua, Democracia y Desarrollo Piura. Perú
112. Davis Morante Trebejo, Instituto de Desarrollo Urbano CENCA, Perú
113. Lic. Luis Isarra Delgado, Secretario General de FENTAP, Presidente de CONTAGUAS
114. Javier Jahncke Benavente, Perú
115. Christian Breustedt, Resucita Perú Ahora, Comisión Ecología Integral, Perú
116. Javier Jahncke Benavente, Peru
117. Laura Vargas Valcárcel, Peru
118. Fernanda Gadea Martinez, Coordinadora Attac España
119. Jorge Fael - Associação Água Pública (Portugal)
120. Georgina Alonso, University of Ottawa, Canada
121. Resucita Perú Ahora-Comisión de Ecología Integral
122. Jorge Arboccó Gallardo, Paz y Esperanza-Perú
123. Margaret Ngima M. K., University of Nairobi
124. Michelle Kooy, IHE-Delft Instituut for Water Education, Netherlands
125. ...

Up to 22.05.2024 repressions went on and legal steps are in the process, please contact the following contacts for more information. See also [Press Release – Bali, Indonesia 21 May 2024](#)

We are continuing to collect signatures after the first release on 20.05.2024. To sign send your name and affiliation to: prathiwi.putri@gmx.de

Contact persons/ Personas de contacto

Reza Sahib, National Coordinator KRUHA, +62 813-7060-1441

Rezky Pratiwi, Director LBH Bali, +62 895-3599-53959

I Nyoman Mardika, anti-corruption activist, Forum Peduli Bali, +62 812 3962 771

Roberto Hutabarat, secretary general Forum Pro-Demokrasi Bali

Prathiwi Putri, scholar-activist network for the People's Water Forum, prathiwi.putri@gmx.de

Setelah konferensi pers pertama pada 20 Mei 2024, yang didalamnya termasuk rilis pernyataan sikap para individu ini, banyak lembaga dan komunitas akademik di Indonesia telah memberikan pernyataan sikap untuk mengutuk keras pembubaran PWF 2024 beserta intimidasi, penganiayaan dan penyanderaan aktivis dan pesertanya, antara lain:

After the first press conference on 20th May 2024, in which the above statement from individuals was also released, there are many Indonesian organizations and academic communities have publicly released their political statements, condemning the cancellation of PWF 2024 and the intimidation, harassment and siege of the activists and participants, among others:

1. Pernyataan bersama YLBHI - KontraS - AJI - WALHI- SAFEnet- Amnesty International Indonesia- Greenpeace Indonesia- Protection International Indonesia
2. Solidaritas Perempuan
3. Research Centre for Law and Social Justice, Fakultas Hukum UGM
4. Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
5. Akademisi Muda dan Aliansi Masyarakat Sipil Bali
6. Jaringan Gusdurian
7. Lembaga Peradaban Luhur
8. Navicula
9. FMN Denpasar
10. Indonesia Corruption Watch
11. ForBanyuwangi
12. Pasraman Air, Bali and beyond